



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD DARHAM
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 437814

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	840.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , LAINNYA Rp. 650.000.000		
2. Tanah Seluas 253 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , LAINNYA Rp. 55.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , LAINNYA Rp. 135.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	82.900.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO 5 TL MIO AL 115 S Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000		
2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE BY8 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 0 MT Tahun 2012, LAINNYA Rp. 63.000.000		
4. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND ASTREA C100 Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.122.900.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.122.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI RAHMI ADIATY
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 448953

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 630.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 112.5 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.000.000

1. MOTOR, SUZUKI NEXT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 225.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 903.000.000

III. HUTANG Rp. 188.150.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 714.850.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : DIAH HURISDIANA
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 443632

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , LAINNYA Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	8.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 125 MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	424.500.000
III. HUTANG	Rp.	84.090.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	340.410.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL HUDAYANTY
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 479275

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ MINI BUSS Tahun 2012, HASIL SENDIRI		
Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	392.986.898
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	492.986.898
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	492.986.898

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IGNATIUS HARRY SUTADI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 489282

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.180.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
4. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
5. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
6. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	90.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.276.000.000



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.276.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASKURI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 429560

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	850.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Y1G02N15L0A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	938.200.000
III. HUTANG	Rp.	245.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	692.600.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALPIANI ARIEPH
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 489469

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.336.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 276.000.000
3. Tanah Seluas 674 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
5. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
6. Tanah Seluas 1176 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
7. Tanah Seluas 1518 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
8. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
9. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
10. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
11. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL



SENDIRI Rp. 45.000.000

12. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 38.000.000

13. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 38.000.000

14. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 110.000.000

15. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 45.000.000

16. Tanah Seluas 122 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 60.000.000

17. Tanah Seluas 897 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 44.850.000

18. Tanah Seluas 1475 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 73.750.000

19. Tanah Seluas 410 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL

SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 252.500.000**

1. MOTOR, HONDA K1H02N14L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 2.500.000

2. MOBIL, HONDA HRV 1,5 SE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ----****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 84.436.219****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 3.673.536.219****III. HUTANG****Rp. 139.804.038****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.533.732.181****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARTIKA HATMISARI
2. Jabatan : KEPALA UPTD
3. NHK : 196528

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	396.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
4. MOTOR, HONDA SCOPPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	119.808.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	81.432.077
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.397.240.077
III. HUTANG	Rp.	110.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.286.840.077

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSDIYANTO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 716601

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	26.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.398.600
D. SURAT BERHARGA	Rp.	226.285.604
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	55.938.157
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	715.622.361
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	715.622.361

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.